

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Di Indonesia pada saat ini partai politik sangat berkembang sangatlah pesat. Hal ini mudah dipahami karena partai politik mencerminkan wajah peran nasional dalam percaturan politik negara. Hal ini dapat dimaknai sebagai cerminan tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Dimulai dengan tujuan menjadi mandiri, menjaga kemandirian, dan meningkatkan pembangunan. Berbagai keinginan mereka yang ingin bersatu dalam NKRI telah melahirkan sebuah partai politik. Munculnya banyak partai politik (multi partai) merupakan pertanda romantisme kehidupan partai politik sejak era kemerdekaan. Secara teori, semakin banyak partai politik yang menawarkan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengarahkan aspirasi mereka, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berkontribusi pada kewajiban sipil mereka. Lebih banyak ruang bagi orang untuk berpartisipasi dan lebih banyak alternatif lebih mungkin untuk mewujudkan sistem pemerintahan di tangan rakyat.¹

Partai politik dianggap sebagai salah satu atribut suatu bangsa dalam demokrasi modern. Partai politik diperlukan untuk menjadi negara berdaulat yang merdeka, para ahli tidak dapat menyangkal keberadaan mereka. Fungsi tersebut dicapai melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil dengan memberi dan memberikan suara secara langsung, terbuka, bebas dan rahasia. Demokrasi modern menciptakan sistem yang disebut Representasi Rakyat. Baik itu ekspresi formal lembaga nasional seperti DPR dan DPRD maupun ekspresi keinginan rakyat di lembaga partai. Partai politik perlu menjalankan fungsinya dengan baik untuk mewujudkan negara demokrasi, namun pada kenyataannya tidak semua fungsi tersebut dijalankan oleh partai politik yang ada. Mengingat fungsi utama partai politik, keberadaan dan kinerja

¹ Elisabeth Sitepu, M.Si, "Peranan Partai Politik dalam Memberikan pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Research Sains* Vol 2, No. 1 (2016): 1.

partai politik merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Ia bukanlah pelaksana atau pemerintah, tetapi kehadirannyalah yang mempengaruhi bagaimana dan ke arah mana pelaksanaan pemerintahan itu berlangsung.² Kehadiran partai politik penting dalam rezim demokrasi yang dianut di banyak negara. Laju pertumbuhan dan perkembangan partai politik seringkali menjadi ukuran derajat demokrasi di berbagai negara. Politik memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kemaslahatan menegakkan politik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki arah, nilai, dan cita-cita yang sesuai dengan tujuan memperoleh kekuatan politik, melalui mana mereka menerapkan kebijakan. Partai politik berperan sebagai mediator yang mengarahkan orientasi politik rakyat kepada pemerintah, menjembatani komunikasi antara daerah dengan pemerintah, dan mengontrol pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat.³ Partai politik yaitu sarana yang tidak terpisahkan dari rezim demokrasi di Indonesia dan negara lain. Partai politik dinilai sebagai perwujudan negara modern karena hampir semua negara maju dan berkembang, komunis, dan demokratis memiliki partai politik. Akan tetapi bentuk dan fungsi partai politik di berbagai negara berbeda dengan sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Partai politik sebagai sarana partisipasi warga negara dalam penyelenggaraan negara merupakan organisasi yang lebih baru dalam kehidupan manusia dibandingkan organisasi nasional, namun sejarah kelahirannya cukup panjang. Namun, ternyata partai politik telah lama digunakan untuk mempertahankan kelompok mapan, misalnya pada tahun 1917, untuk menghancurkan status quo saat Bolsheviks

² Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol 5, No. 1 (2017): 52-53.

³ Muslim Mufti dan Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 29.

mengalahkan Kekaisaran Tsar.⁴ Partai politik memiliki beberapa fungsi, antara lain partai politik seperti rekrutmen politik, pendidikan politik, dan alat manajemen konflik. Partai politik berfungsi sebagai pendidikan politik, yang nantinya dapat diketahui apakah sebuah partai politik menjalankan salah satu fungsinya di daerah, yaitu sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat luas.⁵

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik besar yang masih bertahan sejak awal era reformasi dan tidak terlepas dari peran kaum agamawan dalam nilai-nilai dan misi politik Islam. Nahdlatul Ulama (NU) organisasi sosial-politik kemasyarakatan yang besar di Indonesia secara tidak langsung telah menubuhkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kelangsungan hidup Partai Kebangkitan Bangsa menjadi suatu tantangan bagi elit politik untuk memiliki partai politik dan menghasilkan kader yang berkualitas untuk bertahan.

Proses kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa didasarkan pada mekanisme pemilihan calon kader yang diatur dalam undang-undang dan aturan partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Tahapan kelulusan adalah pendaftaran, seleksi administrasi, uji profisiensi, serta pengesahan dan penetapan sebagai calon tetap kader. Mekanisme pendaftaran calon kader akan diumumkan kepada publik. Prinsip-prinsip dasar kelahiran kembali didasarkan pada Konstitusi, keterbukaan, partisipatif dan pandangan ke depan. Dalam proses kaderisasi, DPP membentuk “tim mantap” yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Majelis Syuro, Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, PBNU. Tentang nomor urut yang diputuskan oleh tim mantap, dengan mempertimbangkan keputusan daerah pemilihan dan keinginan serta prediksi kemenangan PKB di daerah.⁶

⁴ Ichsanul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), 19.

⁵ Payerli Pasaribu, “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* Vol 5, No. 1 (2017): 56.

⁶ Ainur Rafieq, “Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009”, *Journal Governance* Vol 1, No 2 (2011): 75-76.

Partai politik pada idealnya menjalankan fungsinya sebagai wadah atau tempat aspirasi rakyat dalam menjembatani kepentingan rakyat. Fakta yang terjadi di Indonesia banyak dari partai politik mengabaikan proses kaderisasi serta perekrutan basis massa dengan proses dan mekanisme organisasi, dimana keberadaan partai politik hanya bisa dirasakan dan dilihat pada saat momentum pemilu semata, itu pun partai politik sering kali menggunakan cara instan dalam mengarahkan masyarakat agar bisa mendukung partai politik tersebut hanya untuk mendapat suara pada saat pemilu. Sehingga kader partai politik tidak pernah merasakan pembinaan dan tidak melewati pola pengkaderan yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Idealnya partai politik memiliki sebuah nilai, prosedur baku dalam merekrut kader dan massa. Kader maupun massa merupakan wajah dari identitas sebuah partai politik. Kualitas proses kelahiran kembali partai tentu mempengaruhi kualitas kader yang nantinya terpilih baik di posisi pusat maupun pemilihan umum. Kualitas kepengurusan partai juga berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Karena setiap partai politik memiliki kewajiban dan fungsi yang sama sebagai pembentuk kebijakan nasional.

Partai Kebangkitan Bangsa atau biasa disingkat PKB, didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul awal 1419 Hijriah / 23 Juli 1998. Partai politik memiliki tempat dan peran yang sangat penting dalam sistem sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran yang sangat strategis sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dan rakyat. Setiap partai politik memiliki kerangka kerja yang berbeda, dimana kerangka anggotanya disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Kader adalah pelatihan atau penyiapan sumber daya manusia yang mewakili partai politik. Partai Kebangkitan berupaya menghasilkan kader-kader yang loyal dan berkualitas. dan menjalankan tugasnya dengan baik.⁷ Contoh kader PKB dengan kualitas politik yang tinggi adalah

⁷ Yuni Femelia, "POLA PENGKADERAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BERPOLITIK (Study pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017, ii.

Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama Republik Indonesia saat ini. Sebelumnya pernah menjadi anggota DPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), anggota DPRD Kabupaten Rembang 2004-2005, dan Wakil Bupati Rembang 2005-2010.

Partai politik secara teoritis harus mewakili kepentingan rakyat, dan itu tercermin dari landasan maupun tujuan awal terbentuknya partai. Kader merupakan ujung tombak institusi partai sehingga perlu ada upaya melembagakan dan membakukan sistem pengkaderan. Pola perkaderan adalah proses mendidik seseorang menjadi seorang kader. Istilah kader umumnya mengacu pada definisi inti dari kelompok elit atau beberapa kelompok yang memiliki kemampuan untuk lolos dalam proses seleksi. Kader berfungsi sebagai pendukung yang telah menjadi anggota dari suatu partai politik yang ditentukan berdasarkan mekanisme rekrutmen yang berlaku didalam partai politik. Kader juga berfungsi sebagai penggerak roda organisasi partai politik, yaitu sebagai pemimpin serta pengelola partai politik maupun untuk menjadi pejabat-pejabat publik yang telah direkomendasikan oleh partai tersebut.

Perkaderan merupakan proses bertahap dan terus-menerus sesuai capaian, tingkatan, situasi dan kebutuhan tertentu yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan kemampuan fisik, potensi pemikiran, dan moral sosial.⁸ Bagi para kader untuk membantu orang lain dan diri mereka sendiri menyesuaikan situasi saat ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita yang dicita-citakan, nilai-nilai yang dapat dipercaya, dan misi perjuangan yang diemban. Fungsi kaderisasi adalah bagaimana partai merekrut pengurus yang tepat, karena keberadaan partai adalah masa depan keberadaan partai. Jika suatu pihak tidak menghasilkan kader yang berkualitas dan sesuai dari proses kaderisasi, itu akan mempengaruhi kemajuan partai di masa depan. Rekrutmen merupakan sistem terbuka, sehingga kader yang korup tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan partai politik. Selain itu,

⁸ Muhammad AS.Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES.1996), 120.

terdapat kader yang diyakini memiliki nilai jual untuk mencari dukungan suara. Fungsi kaderisasi tidak terlepas dari perkembangan etika politik Islam, dan perkaderan merupakan salah satu media rekrutmen, memperkuat komitmennya terhadap ideologi politik. Pengembangan kapasitas pribadi dan penguatan kelembagaan partai politik jangka panjang tampaknya menjadi makhluk dengan standar sulit bagi kader yang memahami visi dan misi tanpa kelahiran kembali partai, dan partai dipercaya oleh publik.

Kaderisasi politik dalam menjalankan fungsinya partai politik merekrut kader internalnya. Hal ini sangat penting karena salah satu indikator keberhasilan partai melakukan kelahiran kembali adalah ketersediaan kader untuk mempersiapkan momentum konflik politik seperti Pilkada. Tentu saja sangat disayangkan bahwa para kader adalah mereka yang telah berhasil melalui semua perjuangan, prinsip dan ideologi partai, tetapi ketika momentum perjuangan datang, partai merekrut orang luar. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya menjadi garis perjuangan, prinsip, dan ideologi partai nantinya sulit diterjemahkan oleh calon non-kader yang diusung ketika menduduki jabatan politik. Tentunya hal ini juga akan menjauhkan realitas politik dari nilai-nilai ideal yang dimiliki masing-masing pihak ke arah ideal tersebut.⁹

Adanya kaderisasi bertujuan untuk mencetak manusia, jadi proses pencetakannya juga harus konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan: fitrah manusia. Manusia memiliki banyak aspek berbeda yang menjadikannya istimewa sebagai ciptaan Tuhan. Tidak seperti hewan yang tidak berkembang dengan baik secara intelektual, manusia diberkahi dengan alasan yang memungkinkan mereka untuk memiliki pikiran kritis dan mengembangkan kapasitas mental mereka. Berbeda dengan bidadari (katanya) yang tidak memiliki keinginan, manusia dibekali dengan emosi sehingga dapat mengekspresikan keinginannya dalam menanggapi

⁹ Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala daerah Tahun 2015: Kasus Usungan Non-Kader DPD PAN Kabupaten Majene", *Jurnal MaGister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol 2, No. 1 (2016): 112.

lingkungannya. Dan lebih dari itu, manusia memiliki akal (roh) yang mampu menggerakkan seluruh tubuhnya untuk melakukan sesuatu di luar apa yang ia bayangkan. Sederhananya, manusia adalah kesatuan dari tiga aspek potensial ini: intelek, emosi, dan jiwa.

PKB Kudus kini menjadi pemenang kedua dalam pemilu 2019 dengan tujuh kursi. Sementara itu, Pemilu 2004 berhasil keluar sebagai pemenang. Dengan posisi kedua, pada Pilkada 2024 diyakini akan mudah untuk memenangkan partai tersebut. Untuk dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus, DPC PKB Kudus bertujuan untuk membentuk enam sampai tujuh organisasi sayap dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari guru, siswa, siswa dan petani. Dengan adanya kaderisasi yang baik sangat berperan penting dalam mengkomunikasikan pengetahuan politik terkait sejarah, visi, misi, strategi partai, serta isu-isu bangsa dan negara. Pentingnya revitalisasi partai politik khususnya PKB Kabupaten Kudus adalah agar para kader mampu menjalankan ideologinya secara nyata, termasuk tidak hanya revitalisasi kepemimpinan, tetapi juga pengelolaan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Partai Kebangkitan Bangsa Kepemimpinan Kudus dalam Kebijakan DPC dan alokasi sumber daya manusia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “Strategi Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik”.

B. Fokus Penelitian

Pada sub bab ini akan membahas fokus penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sistem kaderisasi Partai PKB kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang ditulis oleh peneliti maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan diantaranya adalah:

1. Bagaimana strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian implementasi pola perkaderan DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik, tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk mengetahui strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang “strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik” menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan pada program studi Pemikiran Politik Islam, terutama berkaitan dengan strategi perkaderan DPC PKB Kabupaten Kudus DPC PKB Kabupaten Kudus.
- b. Skripsi ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi partai politik yang terkait informasi tentang strategi kaderisasi DPC PKB Kabupaten Kudus terhadap peningkatan kualitas kader dalam berpolitik.
- c. Skripsi ini juga dapat dijadikan informasi bagi masyarakat luas, sehingga mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang politik.

F. Sistematika Penulisan

Seperti yang kita lihat sistematika penulisan pada setiap kampus itu berbeda-beda. Adapun sistematika penulisan di IAIN Kudus sendiri adalah:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada BAB I ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistatika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**
Pada bab ini berisi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian strategi, partai politik, kaderisasi dan kualitas partai politik.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.
- BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**
Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan tentang Strategi Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus Terhadap Peningkatan Kualitas Kader Dalam Berpolitik.
- BAB V : PENUTUP**
Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.